

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti. Tetapi penelitian tersebut masih dalam satu ruang lingkup tema yang sama. Hasil penelitian terdahulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Choirul Muchsinin (2017)	Bimbingan Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Madiun Di Ponorogo Tahun 2016	Pelaksanaan bimbingan mental keagamaan Islam berupa ceramah agama / tanya jawab agama Islam dan yasinan/tahlilan bersama diadakan setiap hari Rabu setelah sholat Isya", bimbingan belajar membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap hari Selasa sore, Serta shalat lima waktu secara berjamaah. Faktor pendukung bimbingan mental keagamaan Islam antara lain; Adanya perhatian yang besar dari pihak pengurus. Kepedulian yang besar dari petugas bimbingan mental keagamaan Islam. Tersedianya Fasilitas atau sarana dan prasarana untuk kegiatan bimbingan mental keagamaan Islam. Kemauan yang besar dari warga binaan untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Faktor penghambat, antara lain; Heterogenya latar belakang pendidikan warga binaan. Faktor kesehatan dari warga binaan. Beragamnya usia warga binaan, sehingga kesulitan mengelompokkan

			warga binaan waktu bimbingan mental keagamaan Islam.
<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu mengambil obyek gelandangan dan pengemis di Madiun sedangkan penelitian ini dilakukan di Ponorogo, namun sama sama di UPT yang sama. • Peneliti terdahulu mengambil tema bimbingan terhadap klien rehabilitasi sedangkan penelitian ini ingin mengetahui program rehabilitasi yang dilakukan pihak UPT RSBK. 			
2.	Nitha Chitasari (2012)	Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Cilegon	Mendapatkan hasil kinerja dinas sosial dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis masih belum optimal karena terkendala oleh belum tersedianya panti rehabilitasi serta sarana dan prasarana untuk menangani mereka. Untuk meningkatkan kinerja, pihak dinsaos perlu membangun panti rehabilitasi agar program-program yang dibuat bisa efektif.
<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Dinsos Kota Cilegon sedangkan penelitian ini dilakukan di UPT RSBK Ponorogo • Peneliti terdahulu focus membahas kinerja dinas social kota Cilegon dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis sedangkan penelitian sekarang membahas program yang dilakukan UPT RSBK dalam proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis. 			
3.	Arif Joko Cahyono (2017)	Peran pekerja social dalam merehabilitasi masalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di panti pelayanan social PGOT Mardi Utomo Semarang	Hasil dari penelitian ini adalah berbagai peran pekerja sosial yang secara nyata diterapkan selama treatment berlangsung. Salah satu peran pekerja sosial disini adalah membantu penerima manfaat agar terampil dan mampu berfungsi sosial di masyarakat seperti sedia kala. Sementara itu, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat ketika pekerja sosial merehabilitasi penerima manfaat. Faktor pendukung yang dimaksud adalah berbagai fasilitas yang diperoleh penerima manfaat di Panti Rehabilitasi, dimana berbagai fasilitas tersebut dapat menunjang

			kegiatan rehabilitasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah seperti terbatasnya jumlah anggaran untuk fasilitas dalam menunjang kegiatan keterampilan yang ada.
Perbedaan :			
<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu mengambil lokasi di panti pelayanan social PGOT (pengemis, gelandangan, orang terlantar) Mardi Utomo Semarang, sedangkan penelitian sekarang meneliti UPT RSBK di Ponorogo • Peneliti terdahulu mengambil subyek pekerja social dalam proses rehabilitasi. 			
4.	Ayu Lestari dkk (2021)	Peran panti social rehabilitasi tuna social provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis (studi descriptive pada panti social rehabilitasi tuna social (PSRTS) Provinsi Banten)	<p>Hasil dari penelitian ini adalah peran PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu berperan dalam merealisasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana dalam peraturan tersebut ada permukiman, sandang, asrama/cottage yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan pemulangan ke daerah asal.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu kegiatan keterampilan berupa pelatihan montir motor, kegiatan bimbingan mental spiritual, kegiatan bimbingan fisik, dan kegiatan bimbingan sosial. Faktor penghambat PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yaitu keterlambatan pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke</p>

			PSRTS Provinsi Banten dikarenakan covid-19. Faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya kerjasama dengan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitian di Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial di Provinsi Banten sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di UPT RSBK Ponorogo • Penelitian terdahulu untuk mengetahui peran panti rehabilitasi dalam penanganan gelandangan dan pemengemis sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui program rehabilitasi pada gelandangan dan pengemis. 			

B. Kajian Teori

1. Pelayanan Sosial

a. Pengertian pelayanan social

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan (Badu, 2018).

Secara sederhana, istilah Service bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Sebagai jasa, Service umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah Service menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok) (Hayat, 2017).

Pelayanan sosial adalah aksi (tindakan) untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Pujileksono, dkk. 2018) Secara garis besar, pelayanan sosial sebagai bentuk kebijakan sosial yang dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan dan peraturan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat.(Pujileksono, dkk. 2018).

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial sering disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dari

keseatan yang memuaskan, serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya sepeuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat terlihat luas ruang lingkup kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, tetap pada tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan sosial yang fisik maupun non fisik. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, salah satunya pelayanan sosial.

Pengertian pelayanan sosial pada point pertama sering digunakan oleh Negara-negara maju. Sedangkan point kedua sering digunakan oleh Negaranegara berkembang. Di Amerika Serikat, pelayanan sosial diartikan sebagai suatu aktifitas yang terorganisir, bertujuan untuk menolong orang-orang agar terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui teknik dan metode yang diciptakan melalui tindakantindakan kooperatif untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi.

b. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.

2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan
4. penyesuaian sosial.
5. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan
6. pembangunan.
7. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi (Jamaludin, 2016).

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program-program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik secara individual maupun didalam kelompok/keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

c. Tujuan Pelayanan Sosial

Dilihat dari segi tujuan, pelayanan sosial mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk membantu orang agar dapat mencapai ataupun menggunakan pelayanan yang tersedia.
2. Untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi termasuk didalamnya perlindungan dan perawatan, serta pelayanan yang dilakukan.

3. Untuk pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan pengembangan.(Jamaludin, 2016)

Tujuan di atas merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tingkatan keberhasilan dari pelayanan sosial. Selain itu, pelayanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu untuk pertolongan, pengembangan dan dapat membantu dalam pencapaian menerima pelayanan sosial. Pencapaian tujuan yang dimaksud, tidak lain yaitu untuk membantu individu secara sosial masyarakat dan mempunyai kemandirian, dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah mengalami keberfungsian sosialnya.

2. Rehabilitasi sosial

a. Pengertian Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi adalah suatu program untuk memulihkan sesuatu pada keadaan semula seperti wilayah yang terkena gempa dan tsunami dan mengalami kerusakan parah pada bangunan dan lingkungan maka akan dilakukan rehabilitasi pada wilayah tersebut agar dapat kembali beraktivitas seperti semula, adapun seperti seorang yang menjadi candu terhadap obat-obatan terlarang seperti narkoba dan mengakibatkan ketergantungan, maka dilakukannya rehabilitasi agar kembali pada keadaan semula. Hal ini artinya rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkannya kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi (Abdullah, 2021).

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu pemulihan atau pengobatan. Hal ini bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkotika kepada keadaan seperti semula. Meningkatnya jumlah anak sebagai penyalahgunaan narkotika membuat peran rehabilitasi menjadi penting dan startegis. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu misal pasien rumah sakit, korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat (Angrayni, L., & Yusliati, 2018).

Penyelenggaraan teknis rehabilitasi sosial harus sesuai dengan standar yang sudah diatur agar efektif dan dapat berjalan dengan lancar dalam setiap kasus penyimpangan sosial. Perbedaan penanganan dan penyelenggaraan teknis bagi orang dewasa dan anak dirasakan perlu dilakukan mengingat usia, fisik, mental dan psikologi anak.

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang

yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan Masyarakat.

b. Tujuan Rehabilitasi

Terus meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis diberbagai kota atau wilayah menjadi awal masalah yang jika tidak segera ditindak akan semakin banyak. Untuk itu bidang bimbingan dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Abdullah, 2021).

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk menyadarkan para gelandangan dan pengemis untuk Kembali kemasyarakat dan bekerja sesuai

dengan norma. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses kembalinya kebagian masyarakat yang sesuai. Perlu diberikan bimbingan dan rehabilitasi secara gratis kepada gelandangan dan pengemis serta memberikan bekal keterampilan agar mereka bisa bekerja maupun menciptakan usaha sendiri sehingga tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

3. Gelandangan

a. Pengertian Gelandang

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman. Entang Sastra atmadja mengartikan gelandangan ialah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, seperti di kolong jembatan, di sepanjang lorong–lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emperan toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya (Akbarian, 2014).

Gelandangan Merupakan orang–orang yang hidup dalam ke adaan tidak sesuai dengan norma–norma kehidupan yang layak dalam masyarakat

setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum (Andari, 2018).

Menurut Muthalib dan Sudjarwo bahwasannya gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, kedua, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan ketiga, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandangan yang berarti selalu mengembara. Wirosardjono juga mengatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat (Zainal, 2019)

b. Faktor-faktor Timbulnya Gelandangan

Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini meningkat antaranya adalah peningkatan biaya hidup, kemiskinan, hidup sebatang kara, masalah keluarga dan narkoba. Ini menunjukkan golongan ini memilih untuk hidup sebagai gelandangan atas desakan hidup kesusahan walaupun sebenarnya mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik

Populasi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian

Sosial lima tahun terakhir tahun 2007 berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17% penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan melulu korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidak memilikinya keterampilan, dan pada kenyataannya banyak kita lihat gelandangan yang justru masih mampu untuk berusaha. berusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan (Akbarian, 2014)

Gelandang merupakan masalah Sosial yang akut. Fenomena yang menjadi masalah Sosial di perkotaan, tidak hanya kota besar tetapi di kota-kota kecil. Sebagian gelandangan bertahan hidup dengan cara yang kurang dapat diterima, tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normal yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak gelandangan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atas cap sebagai pengganggu ketertiban.

4. Pengemis

a. Pengertian pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk

mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980).

Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma. Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut pengemis adalah Homeless. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b. Fenomena pengemis

Populasi Pengemis secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial lima tahun terakhir tahun 2007 berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17% penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan melulu korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidakmemilikinya keterampilan, dan pada kenyataannya banyak kita lihat gelandangan yang justru masih mampu untuk berusaha. berusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan.

Seperti yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), pemerintah memaknai kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-

hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Pendekatan yang digunakan meliputi : basic needs (menekankan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai sumber kemiskinan)/ income poverty (menekankan tiadanya kepemilikan aset dan alat produksi)/ basic capability (menekankan keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat)/ social welfare (tekanan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan)/ serta subjective (cara pandang kemiskinan dari sudut orang miskin) pandangan orang miskin sendiri).

Pengemis memang menjadi sesuatu yang tak terelakkan terjadi di kota besar, dimana salah satunya adalah Malang. Memang, persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah kota bertanggung jawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, pemkot membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat.

5. Masalah Sosial dan Usaha Rehabilitasi Sosial (Rehabilitatif)

Sosiologi sebenarnya bukanlah sebuah praktik, melainkan suatu usaha untuk memperoleh pemahaman terhadap realitas dan persoalan sosial. Persoalan sosial yang menarik minat para ahli sosiologi tidak harus sama dengan yang disebut sebagai "persoalan sosial" oleh orang lain. Berbeda dengan konsep "persoalan sosial" yang lebih umum dipahami oleh masyarakat awam atau birokrat sebagai sesuatu yang tidak normal dalam

masyarakat, ahli sosiologi memahami "persoalan sosial" sebagai masalah sosiologis yang terjadi dalam konteks interaksi dan tindakan sosial masyarakat.

Konsep masalah sosial berkaitan dengan norma dan institusi sosial, artinya sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat. Masalah Sosial atau social Problems ialah setiap keadaan yang dianggap oleh seluruh atau sebagian warga masyarakat sebagai suatu yang tak dikehendaki, tak dapat ditoleransi, atau dianggap ancaman bagi nilai-nilai dasar masyarakat. Sehingga memerlukan tindakan masyarakat untuk menyelesaikannya (Giyati & Wardani, 2016).

Manusia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosial. Berbagai analisis dan metode telah digunakan, namun belum ada hasil yang memuaskan. Saat ini, ditemukan metode analisis yang lebih efektif meskipun metode lama yang tidak efektif belum sepenuhnya dihilangkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ilmu sosial belum dapat menetapkan secara pasti apa yang menjadi masalah sosial utama. Selain itu, pengaruh dari penyelesaian masalah sosial tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan setelah jangka waktu yang cukup lama. Namun demikian, penelitian terhadap masalah sosial terus berkembang meskipun metode yang baru mungkin tidak selalu diterima dengan baik karena masalah sosial melibatkan nilai-nilai dan perasaan sosial.

Ada dua metode yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial, yaitu metode preventif dan represif. Metode preventif lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap penyebab masalah sosial. Sedangkan metode represif lebih banyak digunakan, yaitu mengambil tindakan setelah suatu masalah sosial terjadi. Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari metode represif yang dilakukan setelah masalah terjadi.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas mengacu pada jumlah sumber daya manusia atau penduduk yang kurang berkontribusi dalam pembangunan dibandingkan dengan aspek kualitas sumber daya. Kualitas sumber daya manusia menyangkut kemampuan fisik dan non-fisik seperti kecerdasan dan mental. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama untuk mempercepat pembangunan di berbagai bidang.). Sehingga dengan adanya usaha rehabilitasi sosial ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para penyandang disabilitas terkhusus kepada penyandang disabilitas tubuh.

Fokus utama dari upaya ini terletak pada kondisi individu yang menghadapi masalah sosial, terutama dalam usaha untuk merubah atau memperbaiki kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai dengan harapan atau standar sosial yang berlaku. Dalam penanganan masalah sosial, usaha rehabilitatif ini

didasarkan pada asumsi utama bahwa individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial memiliki potensi untuk berubah menuju kondisi yang normal. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dilaksanakan dengan pijakan yang kuat. Jika asumsi yang digunakan adalah bahwa kondisi yang melekat pada individu yang mengalami masalah sosial tidak dapat diubah, maka upaya rehabilitasi tidak akan berhasil. Masalah sosial dapat dipecahkan atau kondisi yang dianggap bermasalah dapat diubah dan diperbaiki dengan menangani faktor-faktor yang membentuknya.

Bentuk usaha rehabilitatif yang lebih ideal adalah penanganan individu yang mengalami masalah sosial dengan berorientasi pada pengembangan kapasitas. Berbagai intervensi dan pelayanan yang diberikan bertujuan agar individu tersebut mengalami peningkatan dalam kapasitas dirinya, sehingga kemudian mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam jangka panjang, meskipun pemberian intervensi dan pelayanan sudah dihentikan, individu tersebut sudah mampu mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri. Upaya rehabilitasi pada pengembangan kapasitas ini lebih mendorong kemandirian dan menghindari ketergantungan.

6. Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1) Pendekatan Awal

Pendekatan awal serangkaian kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk mendapatkan pengakuan/dukungan dari pihak-pihak seperti dengan pihak terkait yang berwenang dalam penertiban bagi

gelandangan, pihak yang peduli terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, terhadap masyarakat sebagai pemilik sumber daya informasi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar dan memotivasi terhadap calon klien untuk masuk panti rehabilitasi sosial. Calon klien yang dimotivasi diperoleh dari proses perekrutan.

Penarikan (Rekrutmen) adalah proses pencarian para calon klien untuk masuk panti rehabilitasi.

Proses ini dimulai ketika klien dicari dan berakhir ditempat rehabilitasi, hasilnya sekumpulan klien yang akan di seleksi pelaksanaan pengambilan yang dilakukan oleh petugas, proses pengambilan penting karena kualitas sumber manusia tergantung pada kualitas pengambilan. Adapun syarat gelandangan yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu:

- a) Sehat rohani dalam arti tidak berpenyakit jiwa.
- b) Sehat jasmani dalam arti tidak berpenyakit menular dan cacat mental.
- c) Tidak sedang dalam urusan dengan pihak kepolisian.
- d) Usia maksimal 60 tahun.
- e) Tidak sedang dalam proses hukuman.
- f) Belum pernah mengikuti pelatihan di UPT RSBK
- g) Belum pernah ikut program transmigrasi
- h) Selama bimbingan/pembinaan bersedia tinggal didalam UPT RSBK
- i) Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib panti.

Adapun cara rerutmen yaitu sebagai berikut:

- a) Trantib keamanan (razia)
- b) Hasil motivasi petugas
- c) Atas kesadaran sendiri

2) **Penerimaan dan pengasramaan**

Kegiatan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

Penerimaan adalah rangkaian kegiatan administratif, maupun teknis yang meliputi registrasi (klien tercatat dalam buku induk panti dengan nomor registrasi sesuai dengan identitas yang dimiliki). Dan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan setelah calon penerima pelayanan selesai menjadi peserta program pelayanan.

Pengasramaan adalah menempatkan klien definitif dalam asrama dengan kondisi, situasi dan fasilitas panti (jika klien adalah keluarga, maka ditempatkan secara keluarga, jika klien individu, maka ditempatkan secara individu atau kelompok).

Penerimaan dan pengasramaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Registrasi, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk administrasi dan mengisi data klien. studi kasus; kegiatan ini merupakan suatu teknis pekerja sosial untuk mempelajari permasalahan klien. dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbinganketerampilan kerja klien berdasarkan pengelompokan data tentang minat dan bakat klien.

3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesment)

Pengungkapan dan pemahaman masalah adalah upaya untuk menyelusuri, menggali data penerima pelayanan, faktor-faktor penyebab masalah klien, tanggapan klien serta kekuatan-kekuatan klien dalam upaya membantu diri klien itu sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisa dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi penerima pelayanan. Adapun aspek-aspek dalam assesment meliputi:

- a) Fisik: yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah kondisi kesehatan klien, riwayat sakit, adanya pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan adanya alergi berikut pengobatan yang pernah atau masih dijalani.
- b) Mental spiritual/psikologis: yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan, dan kematangan emosi klien termasuk bakat, minat.
- c) Sosial: yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah mencakup kondisi keluarga, sekolah, lingkungan masa kecil tempat klien mendapatkan pendidikan pertama, termasuk pola pendidikan dalam keluarga dan komunikasi yang selama ini diterapkan.
- d) Keterampilan: yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah mencakup pendidikan formal maupun non formal, keterampilan yang telah dikuasai klien termasuk pekerjaan yang pernah ditekuni

sebelum menjadi klien di dalam panti.

4) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi social (Intervensi)

Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan pekerja sosial. Hasil asesmen tersebut merupakan proses yang berkelanjutan yang artinya hasil asesmen dilakukan tidak hanya di awal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil asesmen tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yang terdapat dalam asesmen, yang terdiri dari;

a) Bimbingan fisik

Bimbingan fisik adalah: Kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan peraktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalusehat.

b) Bimbingan mental

Bimbingan mental adalah: kegiatan bimbingan untuk memahami dan mendalami serta peraktek tentang mental yang sehat agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan lingkungannya serta tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang negatif.

c) Bimbingan sosial

Bimbingan sosial adalah: serangkaian bimbingan kearah

tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat bagi klien.

d) Bimbingan keterampilan kerja

Bimbingan keterampilan kerja adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada penerima pelayanan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu, sehingga diharapkan menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan mereka mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil pendayagunaan keterampilan kerja yang klien miliki.

5) Evaluasi

Evaluasi ini untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan proses dan hasil pertolongan yang dilalui, dan kemudian diambil kesimpulan apakah keseluruhan proses telah berjalan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.

6) Terminasi

Pengakhiran pelayanan dilaksanakan untuk memastikan hasil evaluasi umum terhadap klien setelah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat

yang bertanggung jawab.

Proses pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja, tetapi perlu menjalin kemitraan dengan berbagai sector terkait, beberapa sektor yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain: tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dunia usaha, lembaga pendidikan, puskesmas ataurumah sakit, dan Satpol PP.

7) Tindak lanjut

Bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta meningkatkan secaralayah. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dalam bentuk pemberian bantuan ulang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan menganalisis data, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitiannya deskriptif studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti (Sugiyono, 2021).

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misal perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan metode alamiah pula.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi sosial. Itu adalah usaha sistematis untuk mempelajari perilaku sosial (sosial behaviour). Psikologi sosial berpusat pada usaha memahami bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi sosial yang terjadi. Psikologi sosial mempelajari perasaan subyektif yang biasanya muncul dalam situasi sosial